



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII – PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



JL. RW MONGINSIDI I
KOTA KUPANG 85229

Telp : (0380) 8443088

FAX : 0380 – 8443088
Email : bptd13.ntt@gmail.com
Web : www.bptd13ntt.com

Nomor : UM.002/9/06/BPTDXIII NTT/2021
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Laporan Monitoring Capaian Kinerja
Triwulan III Tahun 2021

Kupang, 12 Oktober 2021

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Mengalir butir 1(satu) di atas, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir.

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
Kepala Subbagian Tata Usaha



Muh. Iwan, ST
NIP. 19800710 200912 1 004

Tembusan:

Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen
Hubdat



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2021



Daftar Isi



Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	iii
Kata Sambutan	iv
Ringkasan Eksekutif	v

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang	I-1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	I-2
C. Sumber Daya Manusia	I-6
D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-7
E. Sistematika Laporan	I-8
F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	I-10
G. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	I-14

Bab II Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja	II-18
B. Capaian Kinerja Organisasi	II-20
C. Realisasi Anggaran	II-42

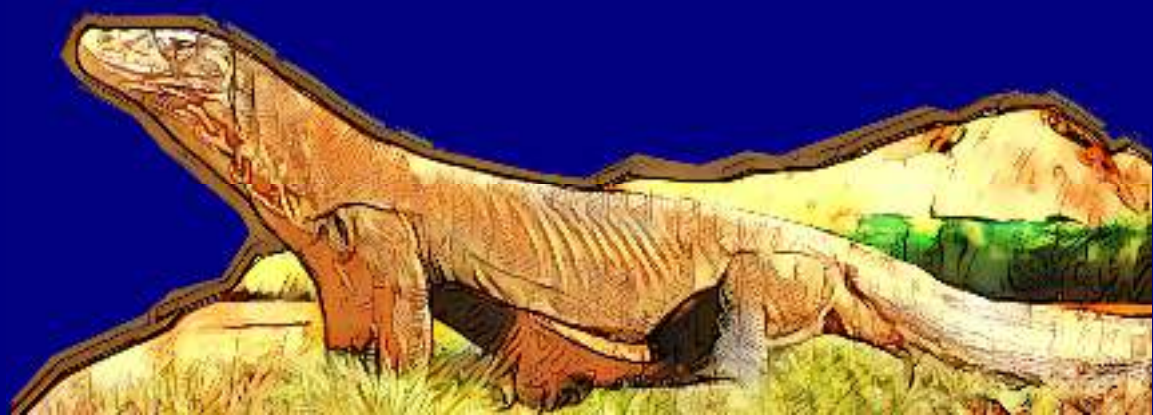
Bab III Penutup

A. Penutup	III-44
------------	--------

Daftar Lampiran

- Lampiran 1.** Revisi II Rencana Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 2.** Revisi II Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 3.** Revisi II Rencana Aksi 2021
- Lampiran 4.** Laporan Realisasi Keuangan Bulan September 2021

KATA SAMBUTAN



Kata Sambutan



Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan III Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan III Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2021 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2021.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Kupang, Oktober 2021

**Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur**

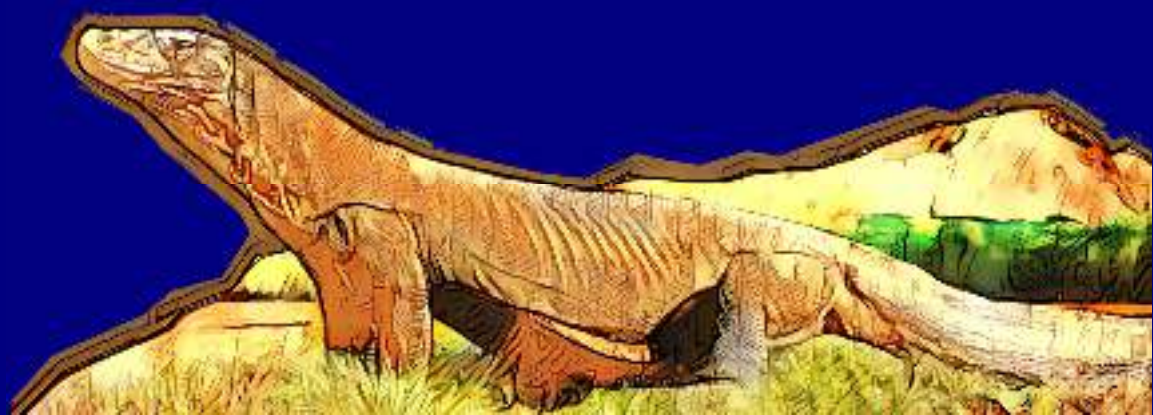


TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)

NIP. 19650117 199003 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF



Ringkasan Eksekutif

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019- 2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1); 2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2); 3. KP – Konektivitas Laut (PP 2); 4. KP – Konektivitas Udara (PP 2); 5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan 6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Renstra memuat 3 (tiga) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2021, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kinerja (SK) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Dari 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur triwulan III tahun 2021, terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan III tahun 2021 adalah sebagai berikut:

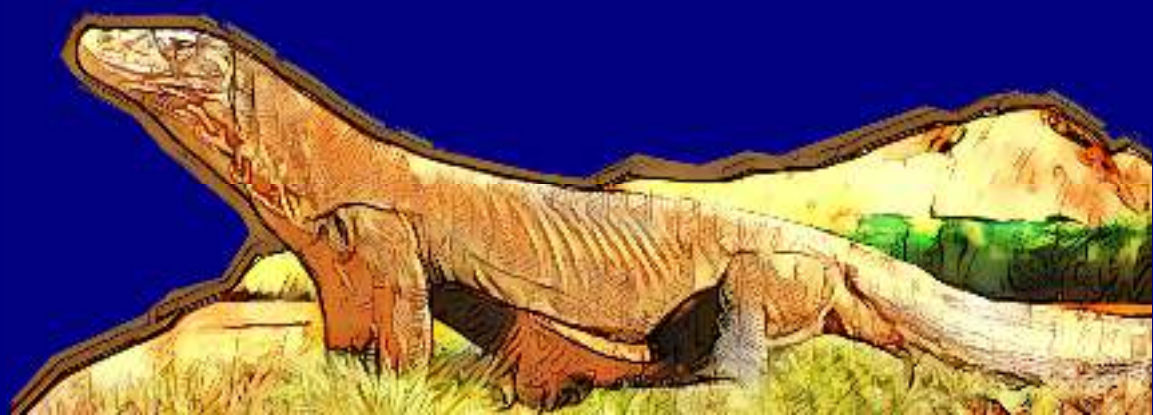
1. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (Spm) Di Terminal Tipe-A (target 0 lokasi);
2. Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda (target 0 lokasi);
3. Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi (target 0 lokasi);
4. Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda (target 2 lokasi);
5. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan (target 100%);
6. Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (target 5 lokasi);
7. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A (target 0%);
8. Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe-A (target 0%);
9. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP (target 96%);
10. Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal (target 100%);
11. Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat (target 15,6%);
12. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, Dan Batas Kecepatan (target 13 lokasi);
13. Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif (target 0 lokasi);
14. Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan (target 50 orang);
15. Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)* (target 1 unit);
16. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (target 44%);

17. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP (target 3 lokasi);
18. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat (target nilai 100);
19. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat (target nilai 100).

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kinerja adalah sebesar 90,85%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

BAB I

PENDAHULUAN



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang



Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai 1 subbagian dan 3 seksi teknis, sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Transportasi Jalan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis.

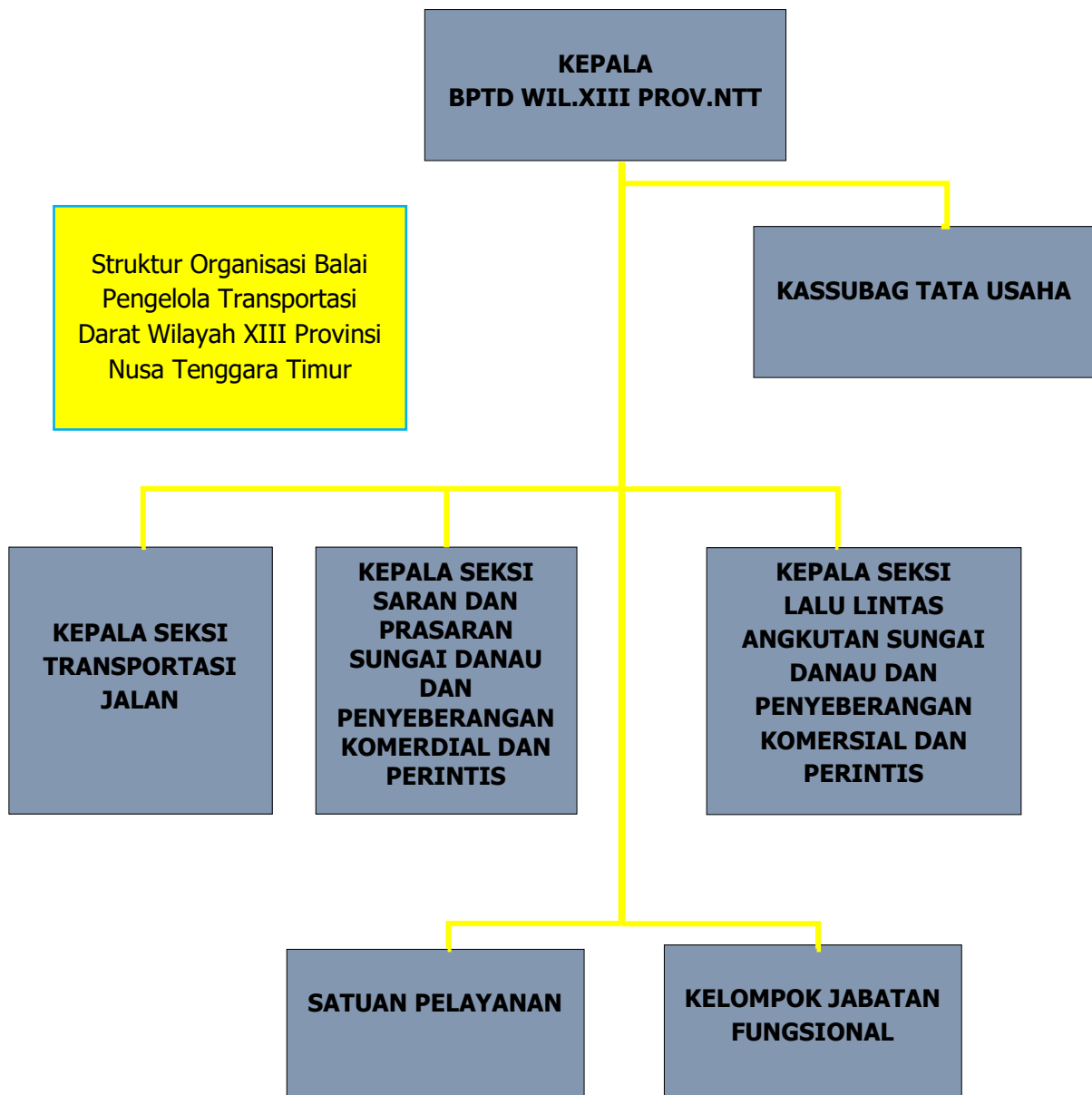
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dibentuk pada bulan Juli Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan klasifikasinya termasuk kelas Tipe C yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan

di bidang lalu lintas dan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



1. Subbagian Tata Usaha

Adapun tugas Kepala Subbag Tata Usaha BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan rencana, program, dan anggaran;
- b. Menyusun bahan pengelolaan urusan tata usaha;
- c. Menyusun bahan pengelolaan urusan rumah tangga;
- d. Menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan;
- f. Menyusun bahan pengelolaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- g. Menyusun bahan evaluasi dan laporan.

2. Seksi Transportasi Jalan

Adapun tugas Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal Tipe A, Terminal Barang, UPPKB;
- b. Menyusun bahan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan;
- d. Menyusun bahan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalann nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan insdustri karoseri;
- e. Menyusun bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dim jalan nasional;
- f. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang;
- g. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. Menyusun bahan pengawasan tarif angkutan jalan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersil dan Perintis

Adapun tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- a. Menyusun bahan rencana pembangunan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
- b. Menyusun bahan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;

- c. Menyusun bahan peningkatan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
- d. Menyusun bahan pengawasan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
- e. Menyusun bahan evaluasi peningkatan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Adapun tugas Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan;
- b. Menyusun bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. Menyusun bahan penjaminan keamanan dan ketertiban di bidang lalu lintas dan angkutan SDP;
- d. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- e. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. Menyusun bahan pelayanan jasa kepelabuhanan sungai, danau, dan penyeberangan;
- g. Menyusun bahan pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- h. Menyiapkan bahan penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pelayanan beooperasi yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi:

- a. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi;
- b. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok;
- c. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo;
- d. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Aimere;

- e. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Larantuka;
- f. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kewapante;
- g. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Naikliu;
- h. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang;
- i. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Rote;
- j. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Waingapu;
- k. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita;
- l. Satuan pelayanan UPPKB Nun Baun Sabu;
- m. Satuan Pelayanan UPPKB Watualo;
- n. Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Kefa

C. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur menaungi sebanyak 214 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPNPN	Sub Total
1	Kepala BPTD	1			1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1			1
3	Kepala Seksi Transportasi Jalan	1			1
4	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi SDP Komersial dan Perintis	1			1
5	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis	1			1
6	Subbagian Tata Usaha	8	0	22	30
7	Seksi Transportasi Jalan	3	2	8	13
8	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi SDP Komersial dan Perintis	1	0	8	9
9	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis	1	1	7	9
10	Satuan Pelayanan UPPKB Nun Baun Sabu	3	0	30	33
11	Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Kefa	0	0	4	4
12	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok	1	0	21	22
13	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	2	0	19	21
14	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo	1	0	10	11
15	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Naikliu	1	0	7	8
16	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang	1	0	7	8
17	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Aimere	1	0	4	5
18	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Rote	1	0	12	13
19	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Larantuka	1	0	6	7
20	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kewapante	1	0	6	7
21	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Waingapu	1	0	4	5
22	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita	0	0	2	2
23	Satuan Pelayanan UPPKB Watualo	0	0	2	2
Total		32	3	179	214

D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- 1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - a. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - b. Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - c. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

- 2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.
- 3) PM No. 122 Tahun 2018
Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:
 - a. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
 - b. Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai terutama untuk yang bertugas di Satuan Pelayanan, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perhubungan.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- a. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan;
- b. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim;
- c. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim;
- d. Peningkatan peralatan transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim;
- e. Pengadaan sarana dan prasarana yang ada di ruas jalan nasional;
- f. Pengadaan subsidi perintis damri yang menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Nusa Tenggara Timur;
- g. Peningkatan Konektivitas melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Jaringan Lintas Penyeberangan;
- h. Peningkatan Kapasitas Jaringan Peyeberangan pada Lintas Utama Mengikuti Perkembangan Peningkatan Kapasitas Jaringan Jalan.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Perjanjian Kinerja
4. Indikator Kinerja Utama
5. Pengukuran Kinerja
6. Evaluasi Kinerja

E. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 Balai Pengeloa Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- C. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- E. Sistematika Laporan

- F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- A. Tahapan Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Revisi II Rencana Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 2. Revisi II Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 3. Revisi II Rencana Aksi 2021
- Lampiran 4. Laporan Realisasi Keuangan Bulan September 2021

F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100%	100%
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	33	58
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	-	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1	2
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100%	100%
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	19	23
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-	-
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-	-
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	14%	70%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100%	100%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	0,21%	0%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi		57
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	500
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-	2
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	4,4%	50%
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	6	9
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
WA		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan	Nilai	85.5	85.5

STAKEHOLDER'S PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP1) <i>Terwujudnya KonektivitasTransportasi Nasional</i> IKP1: Rasio Konektivitas Transportasi Darat IKP5: Rasio Konektivitas Perkotaan		SASARAN PROGRAM (SP2) <i>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan</i> IKP1: IKM Terhadap Pelayanan Transportasi Darat IKP6: OTP Transportasi SDP IKP7: OTP Transportasi Perkotaan		SASARAN PROGRAM (SP3) <i>Meningkatnya Keselamatan Transportasi</i> IKP1: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan IKP2: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi SDP per 10.000 Pelayaran			
CUSTOMER'S PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN (SK1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda		SASARAN KEGIATAN (SK2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat		SASARAN KEGIATAN (SK3) Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan		SASARAN KEGIATAN (SK4) Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	
INTERNAL PROCESS'S PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN (SK5) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat			SASARAN PROGRAM (SP1) <i>Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum</i> IKP1: Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan				
				SASARAN KEGIATAN (SK1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan				
LEARN & GROWTH's PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM (SP2) <i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik</i> IKP1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan							
	SASARAN KEGIATAN (SK2) Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perhubungan Darat		SASARAN KEGIATAN (SK3) Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Ditjen Perhubungan Darat		SASARAN KEGIATAN (SK4) Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat yang Akuntabel		SASARAN KEGIATAN (SK5) Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Darat	
							SASARAN KEGIATAN (SK6) Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Ditjen Perhubungan Darat	

Cascading Sasaran Kinerja BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cascading Sasaran Kinerja BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

G. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada bulan Agustus 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 kembali mengalami revisi untuk yang kedua kalinya, hal ini disebabkan karena Perjanjian Kinerja sebelumnya (revisi I) tidak sesuai dengan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Renstra BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT Tahun 2020-2024. Sehingga dilakukan penyesuaian ulang isi Perjanjian Kinerja terhadap hal tersebut. Adapun berdasarkan hasil revisi II terakhir, berikut ditampilkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 beserta Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja terbaru sesuai Renstra BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT Tahun 2020-2024.

Tabel Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT Tahun 2021.

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	0
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	2
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	5
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya keselamatan	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah	%	100

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
	transportasi darat	terpasang terhadap kondisi ideal		
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15,6
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	13
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	50
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	44%
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang memiliki target 0 (nol) pada tahun ini. Adapun hal ini dikarenakan terkait alokasi anggaran tahun 2021, kelima Indikator Kinerja Kegiatan tersebut memang tidak dikerjakan, namun tetap harus dimasukkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja agar sesuai dengan yang ada dalam dokumen Renstra 2020-2024. Selanjutnya dikarenakan hal tersebut, maka untuk perhitungan capaian kinerja periode Triwulan III ini, kelima Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dianggap mencapai 100% demi memudahkan

perhitungan nilai AKIP pada periode Triwulan III (revisi II Perjanjian Kinerja terdapat pada bagian lampiran dalam laporan ini).

Kemudian terkait dengan alokasi anggaran tahun 2021, Kembali mengalami revisi untuk yang ke-8 (delapan) pada periode Triwulan III. Adapun sebelumnya pada akhir Triwulan II, besar alokasi anggaran revisi ke-7 adalah sebesar Rp.115.530.060.000,00. Selanjutnya pada revisi ke-8 nilai alokasi anggaran berubah menjadi Rp.114.791.218.000,00 untuk Triwulan III. Berikut akan dipaparkan perubahan nilai anggaran berdasarkan jenis belanja dan rincian anggarannya.

Tabel Perubahan PAGU Anggaran Pada Triwulan III (Revisi Ke-8)

	PAGU Setelah Revisi Pada Triwulan II (Rp))	Perubahan (Rp)	PAGU Setelah Revisi Pada Triwulan III (Rp)
Belanja Modal	66.462.507.000,00	-634.875.000,00	65.827.632.000,00
Belanja Barang	43.424.198.000,00	1.178.944.000,00	44.603.142.000,00
Belanja Pegawai	5.643.355.000,00	-1.282.911.000,00	4.360.444.000,00
Total	115.530.060.000,00	-738.842.000,00	114.791.218.000,00

Tabel Alokasi PAGU BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2021 (Revisi Ke-8)

NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU SEMULA REVISI I PK 2021	PERUBAHAN	PAGU MENJADI REVISI II PK 2021
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur	115.530.060.000	-43.167.000	115.486.893.000
Program Infrastruktur Konektivitas	103.868.129.000	1.239.744.000	105.107.873.000
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	46.535.543.000,00	-466.412.000	46.069.131.000,00
Pelayanan Transportasi Darat	23.770.217.000,00	0	23.770.217.000,00
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	31.002.128.000,00	2.000.000.000	33.002.128.000,00
Penunjang Teknis Transportasi Darat	2.560.241.000,00	-293.844.000	2.266.397.000,00
Program Dukungan Manajemen	11.661.931.000,00	-1.282.911.000,00	10.379.020.000,00
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.018.576.000	0	6.018.576.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	5.643.355.000,00	-1.282.911.000	4.360.444.000,00

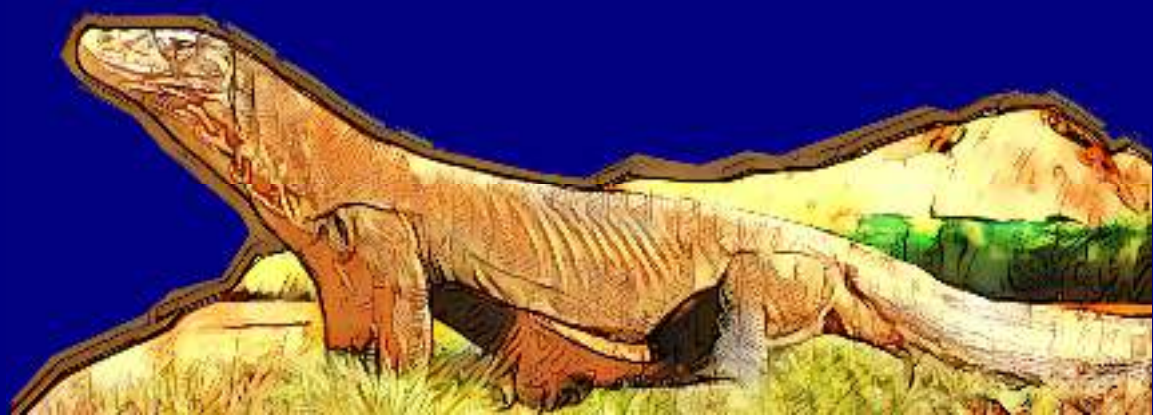
Contents

Bab I	Pendahuluan	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.	Subbagian Tata USaha	4
2.	Seksi Transportasi Jalan	4
3.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersil dan Perintis	4
4.	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis	5
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	5
C.	Sumber Daya Manusia	6
D.	Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	7
1.	Kewenangan	7
2.	Sumber Daya Manusia	7
3.	Anggaran	7
4.	Isu Strategis	8
5.	Ruang Lingkup	8
E.	Sistematika Laporan	8
F.	Uraian Singkat Perencanaan Strategis	10
G.	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	14

BAB II

CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN IIII



Bab II

Capaian Kinerja Triwulanan III

A. Tahapan Pengukuran Kinerja



**KMP. Ranaka di Pelabuhan Penyeberangan Naikliu,
Kabupaten Kupang, NTT**

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Presentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Presentase Pengukuran Indikator Kinerja Kinerja (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kinerja (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dengan adanya revisi Perjanjian Kinerja yang kedua seperti yang telah diJelaSKan sebelumnya, maka perlu dilakukan perhitungan ulang untuk mengetahui nilai capaian kinerja untuk triwulan I dan triwulan II. Berdasarkan perhitungan ulang nilai capaian kinerja dengan menggunakan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan yang terbaru (revisi II) maka diketahui bahwa progress nilai capaian kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk triwulan I, triwulan II dan triwulan III untuk tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel II.1.

Adapun berdasarkan data yang dipaparkan pada Tabel II.1, dapat dilihat bahwa secara akumulatif selalu terjadi peningkatan terhadap nilai AKIP pada setiap triwulan. Hal ini menandakan bahwa Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk bekerja seoptimal mungkin untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang handal dan berkeselamatan di wilayah kerjanya.

Tabel II.1 Progres Nilai AKIP BPTD Wilayah XIII Provinsi NTT Tahun 2021

No	Sasaran Kinerja (Revisi II)	Nilai Capaian Sasaran Kinerja (Revisi II)		
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
1.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	85%	97%	100%

No	Sasaran Kinerja (Revisi II)	Nilai Capaian Sasaran Kinerja (Revisi II)		
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
2.	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	48%	77%	88%
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	24,99%	49,98%	66,44%
5.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	100%	100%	100%
Progress Akumulatif Nilai AKIP Per Triwulan Tahun 2021		71,6%	84,80%	90,85%

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja (revisi II) dengan capaian Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur maka diperoleh data Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar **90,85%**. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja sebagaimana tampak pada Tabel II.2. Adapun sesuai dengan penjelasan sebelumnya pada Bab I, maka untuk Indikator Kinerja Kegiatan yang memiliki target 0 pada Perjanjian Kinerja Revisi II akan diabaikan dianggap memiliki nilai capaian 100% demi memudahkan perhitungan nilai AKIP pada triwulan III ini.

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan triwulan III Tahun 2021, berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja terbaru dari 19 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 16 (enam belas) IKK berstatus hijau dan 3 (tiga) IKK berstatus merah.

Penjelasan capaian IKP untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut. Untuk 5 (lima) IKK yang memiliki target 0, maka akan diabaikan dan tidak dijelaskan dalam bagian ini demi memudahkan penjelasan analisisnya, namun tetap ditampilkan dalam setiap SK yang memiliki IKK dengan target 0 tersebut dan dianggap pencapaiannya 100%. Adapun IKK yang memiliki target 0 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. SK 1 : Meningkatkan Keterpaduan Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda
 - IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda;
 - IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi.
- b. SK 2 : Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat
 - IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A;
 - IKK 2.2 Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe-A.
- c. SK 3 : Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat
 - IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

Tabel II. 2 Capaian IKK dan SK Triwulan III Tahun 2021

Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Triwulan III					
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Prognosa Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					100%	Rp.46.069.131.000	Rp.39.161.412.969	85,41%
	IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%			
	IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0	0	0	100%			
	IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	0	0	0	100%			
	IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	2	2	2	100%			
	IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	100	100%			
	IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan Sdp Yang Beroperasi	Lokasi	5	5	5	100%			
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					100%	Rp. 23.770.217.000	Rp. 20.538.695.798	86,41%
	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	0	0	0	100%			
	IKK 2.2 Persentase Penerapan Smart Terminal Tipe-A	%	0	0	0	100%			

Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Triwulan III					
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Prognosa Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	96	96	96	100%			
SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					88%	Rp. 32.306.453.000	Rp. 30.035.561.712	93%
	IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	103,4	103%			
	IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15,6	15,6	15,6	100%			
	IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	13	13	13	100%			
	IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0	0	0	100%			
	IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	50	50	0	0%			
	IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	1	1	1	100%			
	IKK 3.7 Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	44	44	44	100%			

Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan			Satuan	Target	Triwulan III					
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Prognosa Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Keuangan (%)
	IKK 3.8	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	3	3	3	100%			
SK 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						74,93%	Rp.6.018.576.000	Rp. 4.652.050.595	77,29%
	IKK 4.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	74,93	74,93%			
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						100%	Rp.4.360.444.000	Rp. 3.328.936.283	76,34%
	IKK 5.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	100	100%			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kinerja							90,85%			
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan							93,15%			
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100% (IKK ≥100%)							17			
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Yang Lebih Kecil Dari (IKK ≤100%)							2			

1. Sasaran Kinerja 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggunakan 6 (enam) IKK, yaitu:

1. IKK 1.1 : Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan (target 100%);
2. IKK 1.2 : Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda (target 0 lokasi);
3. IKK 1.3 : Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi (target 0 lokasi);
4. IKK 1.4 : Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda (target 0 lokasi);
5. IKK 1.5 : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan (target 100%);
6. IKK 1.6 : Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (target 5 lokasi);

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan			Satuan	Target	Triwulan III		
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						100%
	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100%
	IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0	0	0	100%
	IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	0	0	0	100%
	IKK 1.4	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	Lokasi	2	2	2	100%
	IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	100	100%
	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan Sdp Yang Beroperasi	Lokasi	5	5	5	100%

Tabel II. 3 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

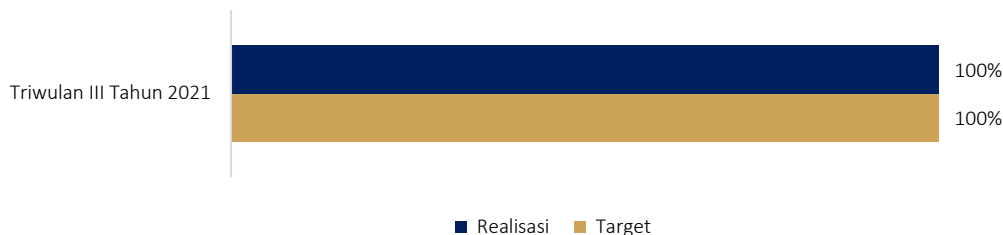
Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trayek yang ditargetkan dengan jumlah trayek yang beroperasi. Untuk menghitung persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan (35 trayek) dapat menggunakan rumus berikut:

$$\begin{array}{l} \text{\% pelaksanaan} \\ \text{keperintisan angkutan} \\ \text{jalan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Trayek yang terlayani}}{\text{Jumlah Trayek yang ditargetkan untuk terlayani}} \times 100\%$$

Layanan keperintisan angkutan jalan berupa Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota Dalam Provinsi dengan total 35 trayek yang tersebar di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun rincian trayek dapat dilihat pada bagian lampiran dari laporan ini.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian kinerja pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan pada triwulan I mencapai 100%. Sedangkan pada triwulan III, persentase realisasinya juga mencapai 100%. Ini berarti 35 trayek yang ditargetkan dapat beroperasi atau dengan kata lain terlayani.



Grafik II. 1 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Sebanyak 35 trayek yang dilayani, terjadi penurunan jumlah pencapaian trip dan okupansi angkutan akibat adanya kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun begitu, pelayanan angkutan perintis pada 35 trayek tersebut masih beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin kegiatan perekonomian masyarakat di sekitar trayek tersebut serta mencegah menyebarnya virus covid-19 tersebut.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan tetap memastikan pelayanan pada 35 trayek angkutan perintis, serta melakukan pengawasan monitoring pelaksanaannya secara berkala.

IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda

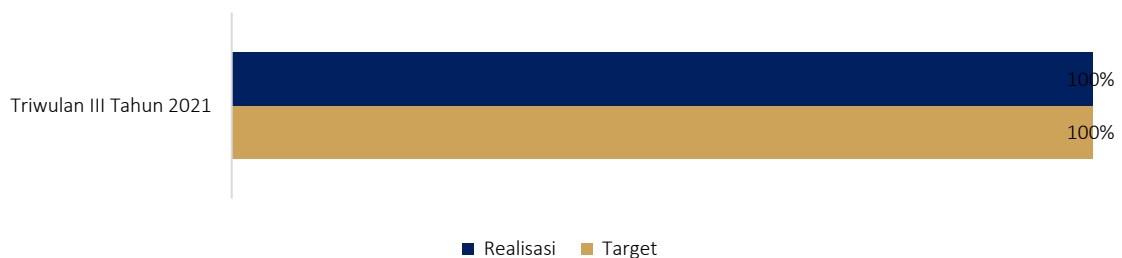
Capaian kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda adalah berupa Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Lanjutan Tahap IV (1 Lokasi) dan Pembangunan Terminal Barang Internasional Tahap III (1 lokasi). Adapun IKK ini dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi progress pekerjaan di lapangan dengan target yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Untuk menghitung persentasenya dapat dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda} = \frac{\text{Progress Realisasi Pekerjaan}}{\text{Target Keseluruhan Pekerjaan}} \times 100\%$$

Sebelum menghitung persentase pencapaian IKK ini, maka perlu dilakukan Analisa pencapaian rata-rata terhadap pembangunan kedua terminal tersebut. Adapun progress pembangunan masing-masing terminal telah mencapai 100% (dapat dilihat pada bagian lampiran), maka dapat ditentukan bahwa rata-rata progress pekerjaannya telah mencapai 100%

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, IKK ini telah mencapai 100% atau dengan kata lain telah selesai dikerjakan.



Grafik II. 2 Capaian IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Meski sempat diganggu dengan kondisi pandemic covid-19 dan bencana badai seroja, tetapi akhirnya IKK ini berhasil dituntaskan sesuai target dan dinilai berhasil.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan melakukan pengoperasian dan perawatan fasilitas yang telah dibangun demi pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

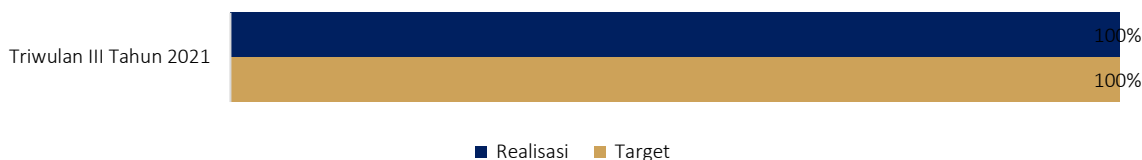
IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi progress pekerjaan di lapangan dengan target yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Untuk menghitung persentasenya dapat menggunakan rumus berikut:

$$\begin{array}{l} \% \text{ Persentase Pelaksanaan} \\ \text{Pelayanan Keperintisan} \\ \text{Angkutan Penyeberangan} \end{array} = \frac{\text{Progress Realisasi Pelayanan}}{\text{Target Keseluruhan Pelayanan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan untuk Triwulan III telah mencapai 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa semua lintasan penyeberangan perintis terlayani dengan baik. Adapun data rekapitulasi pelayanan angkutan perintis dapat dilihat pada bagian lampiran.



Grafik II. 3 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Kondisi pandemi covid-19 dan kondisi cuaca buruk sedikit mengganggu pelaksanaan pelayanan angkutan penyeberangan perintis. Namun sudah dilakukan upaya optimal untuk menjamin kelancaran pelaksanaan IKK tersebut dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan dan keselamatan pelayaran.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan tetap mengoptimalkan pelayanan yang memenuhi aspek keselamatan pelayaran dan protokol Kesehatan, serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan IKK ini.

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

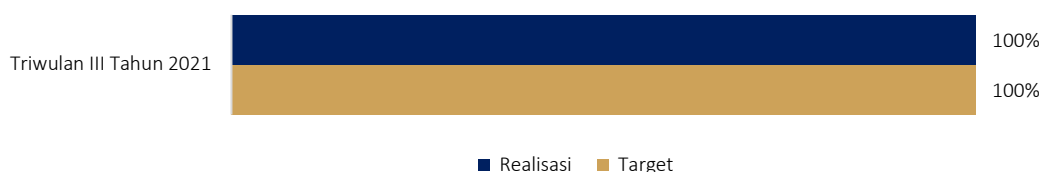
Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dengan jumlah total pelabuhan SDP di NTT. Untuk menghitung persentase Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi dapat menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Jumlah Pelabuhan Yang Beroperasi} = \frac{\text{Realisasi Operasional}}{\text{Target Operasional}} \times 100\%$$

Untuk target operasional, BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 5 (lima) Pelabuhan penyeberangan yang ditempati oleh Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan di wilayah kerjanya.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi mencapai 100% pada triwulan III. Saat ini 18 pelabuhan SDP tersebut masih beroperasi untuk melayani para pengguna jasa dan kapal SDP.



Grafik II. 4 Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Kondisi pandemic covid-19 sedikit mengganggu pelaksanaan pengoperasian pelabuhan SDP. Selain itu, factor cuaca buruk juga masih sering mengganggu operasional pelabuhan SDP. MeSKI begitu, pelayanan 5 pelabuhan SDP tersebut masih berjalan lancar terutama pada kondisi cuaca bersahabat.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan tetap mengoptimalkan pengoperasian 5 pelabuhan SDP yang tersebar di wilayah NTT dan juga tetap melakukan pengawasan melalui Satpel Pelabuhan Penyeberangan dan juga monitoring pengawasan operasional pelabuhan.

2. Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggunakan 3 (tiga) IKK, yaitu:

1. IKK 2.1: Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A (target 0%);
2. IKK 2.2: Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A (target 0%);
3. IKK 2.3: Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP (target 96%)

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan			Satuan	Target	Triwulan III		
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat						100%
	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A	%	0	0	0	100%
	IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0	0	0	100%
	IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP	%	96	96	96	100%

Tabel II. 4 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

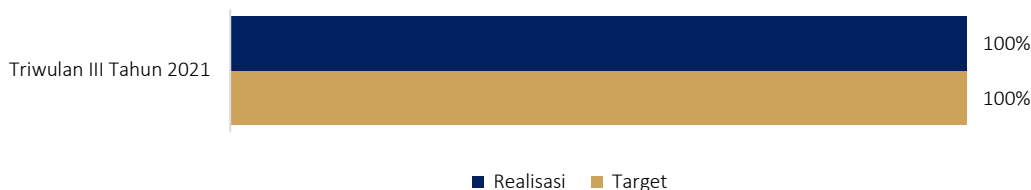
Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dapat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi penerapan SPM di pelabuhan penyeberangan dengan target yang ditetapkan. Untuk menghitung persentase Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dapat menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan SPM}}{\text{Target Pemenuhan SPM}} \times 100\%$$

Untuk rincian pemenuhan SPM di Pelabuhan Penyeberangan dapat dilihat pada bagian lampiran dari laporan ini.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sudah mencapai 96% pada triwulan III, dan dengan begitu maka pencapaiannya telah memiliki nilai sebesar 100% terhadap target yang telah dicanangkan.



Grafik II.5 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Hingga periode Triwulan III berakhir, secara rata-rata semua pelabuhan penyeberangan yang ada di NTT sudah menerapkan SPM sebesar 96%. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 96%.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dilakukan perbaikan monitoring dan pengawasan SPM di Pelabuhan Penyeberangan.

3. Sasaran Kinerja 4: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggunakan 8 (delapan) IKK, yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal (target 100%);
2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat (target 15,6%)
3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan (target 13 lokasi);
4. IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif (target 0 lokasi);
5. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan (target 50 orang);
6. IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE) (target 1 unit);
7. IKK 3.7 Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (target 44%)
8. IKK 3.8 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP (target 3 lokasi):

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan			Satuan	Target	Triwulan III		
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						88%
	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	103,4	103%
	IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15,6	15,6	15,6	100%

Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan			Satuan	Target	Triwulan III		
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, Rass, Dan Batas Kecepatan	Lokasi	13	13	13	13	100%
IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0	0	0	0	100%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	50	50	0	0	0%
IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*	Unit	1	1	1	1	100%
IKK 3.7	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	44	44	44	44	100%
IKK 3.8	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	Lokasi	3	3	3	3	100%

Tabel II. 5 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

IKK 3.1 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal

Capaian kinerja Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase pencapaian item-item yang termuat dalam indikator ini. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPTD Wiluah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk indikator kinerja ini dibagi dalam item pekerjaan. Adapun untuk menghitung persentase pencapaian realisasi per item dapat menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ pencapaian per item} = \frac{\text{Realisasi item terpasang}}{\text{Target item terpasang}} \times 100\%$$

Selanjutnya setelah mendapat persentase progress realisasi per item maka perhitungan realisasi IKK ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \% \text{ Pengadaan dan} \\ \text{Pemasangan Perlengkapan} \\ \text{Fasilitas Keselamatan} \\ \text{Jalan yang telah terpasang} \\ \text{terhadap Kondisi Ideal} \end{array} = \frac{\text{Total Persentase Pencapaian Per Item}}{\text{Total Jumlah Item}} \times 100\%$$

Berikut akan dipaparkan rekapitulasi progress pemasangan tiap item pekerjaan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan pada Tabel II.6 berikut:

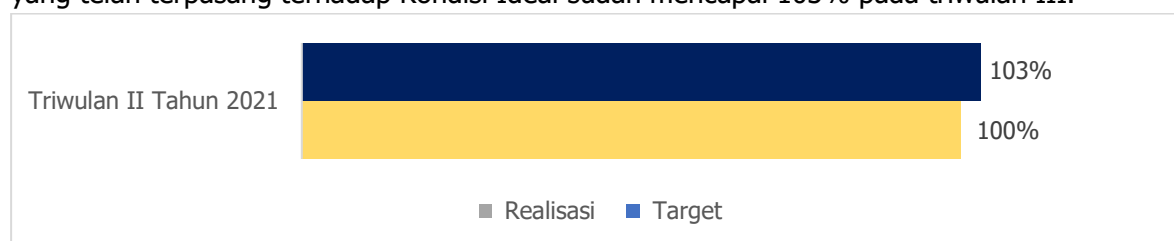
No.	Item	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Rambu Standar 75x75	Unit	357	357	100%
2.	Rambu 90x90	Unit	199	199	100%
3.	Rambu 120x120	Unit	4	4	100%
4.	RPPJ	Unit	8	8	100%
5.	LPJU	Unit	135	183	135%
6.	Pagar Pengaman Jalan/Guardrail (unit/4 m)	Meter	1.872	1.872	100%
7.	END	Unit	248	248	100%
8.	ATCS	Paket	1	1	100%
9.	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Paket	1	1	100%
Rata-Rata % Realisasi					103%

Tabel II. 6 Item Pekerjaan Pemasangan Perlengkapan Keselamatan Jalan Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel II.6 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data pada Tabel II.6, nilai pencapaian untuk IKK 3.1 adalah sebesar 103%. Hal ini menandakan bahwa semua pekerjaan yang termasuk dalam item IKK 3.1 ini telah selesai dikerjakan, dan hasilnya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena untuk item pekerjaan pemasangan LPJU melebihi dari target yang telah ditetapkan.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Persentase Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal sudah mencapai 103% pada triwulan III.



Grafik II.14 Capaian IKK Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Hingga periode Triwulan III berakhir, semua pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan waktu dan kuantitas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk IKK 3.1 dapat dikatakan telah berhasil dikerjakan.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dilakukan perawatan terhadap item pekerjaan yang telah selesai dikerjakan secara berkala.

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

Capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kendaraan yang melanggar dengan jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB. Adapun untuk menghitung persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dapat menggunakan rumus berikut:

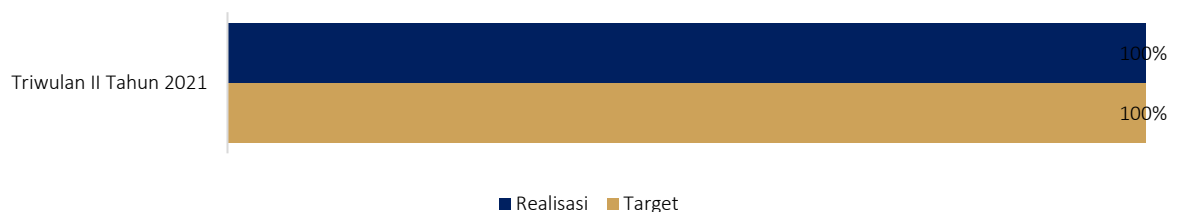
$$\% \text{ Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Jumlah Kendaraan Yang Melanggar}}{\text{Jumlah Kendaraan Yang Masuk}} \times 100\%$$

Selanjutnya, karena semakin tinggi nilai persentase indikator ini menunjukkan semakin buruk kinerjanya, maka untuk menghitung persentasenya menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat masih mencapai di bawah 15,6% pada triwulan III, atau dengan kata lain sejauh ini indikator kinerja ini masih memiliki pencapaian yang memuaskan dan memiliki persentase pencapaian 100%.



Grafik II.6 Capaian IKK Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Pengawasan dan penegakan hukum yang massif, serta diikuti dengan sosialisasi tentang Kendaraan ODOL dan tata cara pemuatan sangat berdampak kepada kecilnya jumlah kendaraan melanggar yang masuk di UPPKB Nunbaun Sabu.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu tetap melakukan penegakan hukum dan sosialisasi Kendaraan ODOL kepada para pengemudi angkutan barang dan pengusaha.

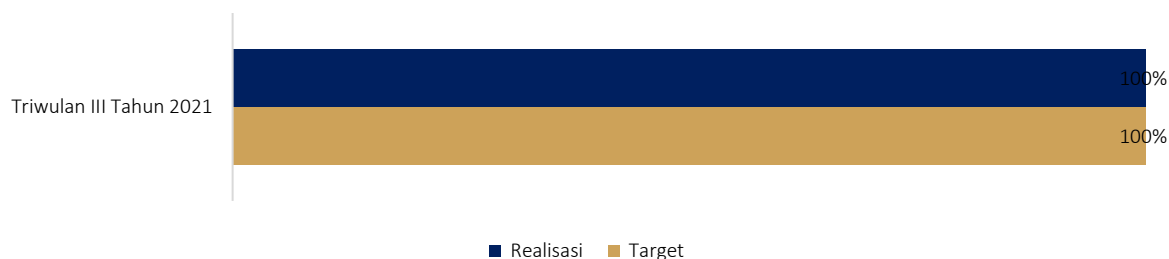
IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional

Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara Jumlah ZoSS/RASS/Batas Kecepatan Yang Terealisasi dengan Jumlah ZoSS/RASS/Batas Kecepatan Yang Ditargetkan. Adapun untuk menghitung persentase Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional dapat menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{\% Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan} \\ \text{ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan} \\ \text{Nasional} &= \frac{\text{Jumlah ZoSS/RASS/Batas Kecepatan Yang Terealisasi}}{\text{Jumlah ZoSS/RASS/Batas Kecepatan Yang Ditargetkan}} \times 100\% \end{aligned}$$

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Persentase Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional telah mencapai 100% ada triwulan III.



Grafik II.7 Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Dari 13 paket yang ditargetkan, semuanya telah selesai dikerjakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa IKK 3.3 ini telah selesai dikerjakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu akan dilakukan perawatan secara berkala.

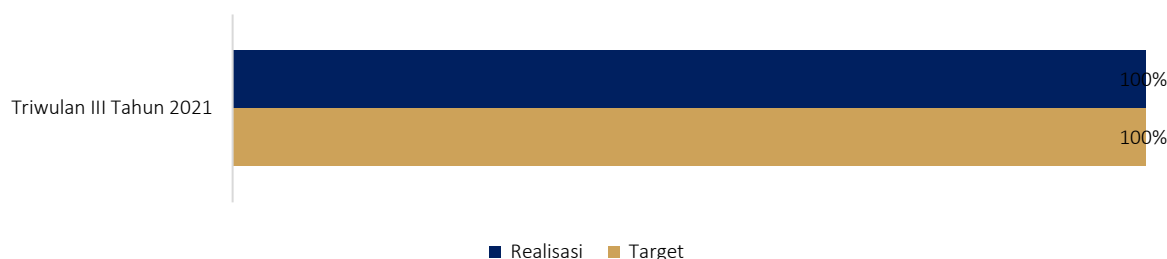
IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Capaian kinerja Sosialisasi Andalalin di Provinsi NTT dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi jumlah peserta kegiatan dan target peserta kegiatan. Adapun untuk menghitung persentase pencapaian realisasi Sosialisasi Andalalin di Provinsi NTT dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{\% Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan} = \frac{\text{Realisasi Peserta Kegiatan}}{\text{Target Peserta Kegiatan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Persentase Sosialisasi Andalalin di Provinsi NTT masih mencapai 0% pada triwulan III, atau dengan kata lain belum ada masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Andalalin pada tahun 2021 ini.



Grafik II.8 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Belum adanya masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi andalalin diakibatkan belum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tersebut. Adapun yang menjadi penghambat kegiatan ini adalah akibat adanya pandemi covid-19 yang masih merebak hingga saat ini.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu segera dilakukan sosialisasi andalalin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*

Capaian kinerja Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE) telah mencapai 100%. Adapun untuk menghitung persentase pencapaian realisasinya dapat menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian persentase Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)* telah mencapai 100%, dengan adanya Satpel UPPKB Nunbaun Sabu yang telah dioperasikan dengan fasilitas yang memadai.



Grafik II.9 Capaian IKK Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Hingga Triwulan III berakhir, IKK ini telah berhasil diselesaikan dengan pencapaian 100% dari target yang telah ditetapkan.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang perawatan terhadap fasilitas di UPPKB Nunbaun Sabu dan peningkatan dari segi SDM maupun teknologi sesuai perkembangan zaman dan aturan yang berlaku.

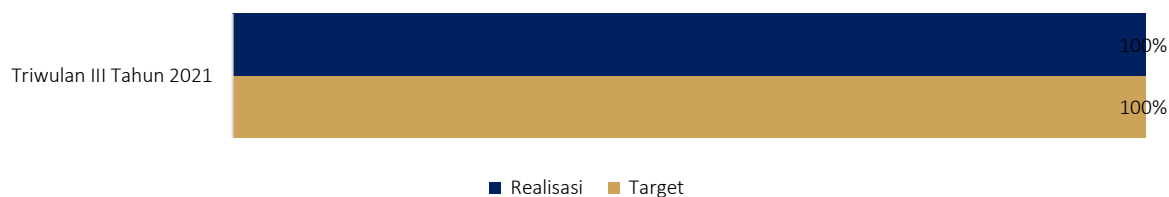
IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Capaian kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berdasarkan perbandingan antara realisasi jumlah pengujian kendaraan bermotor dengan jumlah kabupaten di NTT, dimana hal ini berdasarkan kewajiban setiap kabupaten untuk memiliki pengujian kendaraan bermotor yang telah terakreditasi. Adapun untuk menghitung persentase pencapaian realisasi Monitoring Pengawasan Kalibrasi dan Akreditasi Alat Uji dapat menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor}}{\text{Jumlah Kabupaten Di NTT}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah mencapai 100% pada triwulan III. Hal ini berdasarkan pada rencana tahun ini akan dilakukan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada 9 (Sembilan) kabupaten dari total 21 (dua puluh satu) kabupaten di NTT (sebesar 44% dari jumlah kabupaten di NTT secara keseluruhan). Pada bulan Agustus 2021, Sembilan pengujian berkala kendaraan bermotor telah selesai dilakukan standarisasi.



Grafik II.10 Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Hingga Triwulan III berakhir, IKK ini telah memenuhi targetnya yang telah ditetapkan.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan adalah akan dilanjutkan untuk kabupaten lain pada tahun depan

IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

Capaian Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP dapat dihitung berdasarkan membandingkan total progress pada masing-masing lokasi dengan target pencapaian seluruh lokasi. Adapun untuk menghitung persentase pencapaian realisasi Pembangunan SBNP pada setiap lokasi dapat menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Pembangunan SBNP Per Lokasi} = \frac{\text{Realisasi Pembangunan Per Lokasi}}{\text{Target Pembangunan Per Lokasi}} \times 100\%$$

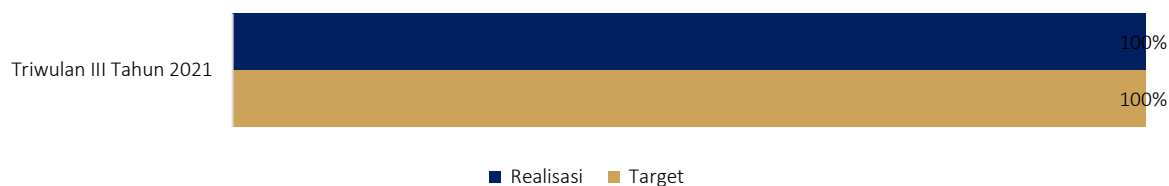
Selanjutnya setelah diperoleh besaran persentase setiap lokasi, maka digunakan rumus rata-rata seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Pembangunan SBNP} = \frac{\text{Total Realisasi Progress}}{\text{Total Target}} \times 100\%$$

Pembangunan SBNP pada tahun 2021 dilakukan di 3 (tiga) lokasi yaitu Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Pelabuhan Penyeberangan Hansisi dan Pelabuhan Penyeberangan Pamana.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP, 3 lokasi pembangunan SBNP yang dikerjakan pada tahun ini telah selesai dikerjakan, dan dengan kata lain untuk triwulan III telah mencapai 100%.



Grafik II.11 Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Hingga Triwulan III berakhir, ketiga lokasi pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan selanjutnya adalah perawatan secara berkala.

4. Sasaran Kinerja 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggunakan 1 IKK, yaitu:
IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan			Satuan	Target	Triwulan III		
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						74,93%
	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	100	100	74,93	74,93%

Tabel II.7 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dapat dihitung berdasarkan realisasi dan target yang dicanangkan. Adapun untuk menghitung persentase indikator kinerja ini dapat menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

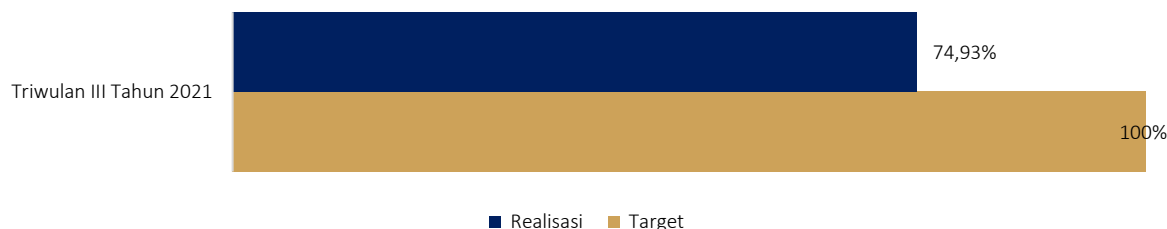
Adapun pencapaian IKK ini merupakan rata-rata pencapaian dari beberapa item sebagai berikut:

No	Item	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Daya serap anggaran	%	97,33	86,37	89%
2	Penyelenggaraan layanan administrasi perkantoran	bulan	12	9	75%
3	Laporan Kinerja Bulanan BPTD	laporan	12	9	75%
4	Laporan Kinerja Tahunan BPTD	laporan	1	0,68	68%
5	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan BPTD	laporan	4	3	75%
6	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPTD	laporan	1	0,67	67%
Rata-Rata % Realisasi					74,93%

Tabel II.8 Item IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Persentase Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada triwulan III telah mencapai 74,93%.



Grafik II.12 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Hingga Triwulan III berakhir, capaian IKK ini masih di bawah target, hal ini disebabkan adanya beberapa item yang hanya bisa dikerjakan pada akhir tahun yaitu Laporan Akhir Tahun dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Namun hal ini masih berindikasi baik, karena masih sesuai dengan jumlah bulan yang telah dilalui dan masih memiliki peluang besar untuk terselesaikan di akhir tahun.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu akan dilakukan optimalisasi pengerjaannya agar realisasinya dapat sesuai dengan target yang telah dikerjakan.

5. Sasaran Kinerja 1: Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja 1: Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggunakan 1 IKK, yaitu:

IKK 5.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan			Satuan	Target	Triwulan III		
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						100%
	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	100	100%

Tabel II.9 Capaian IKK dan SK Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat

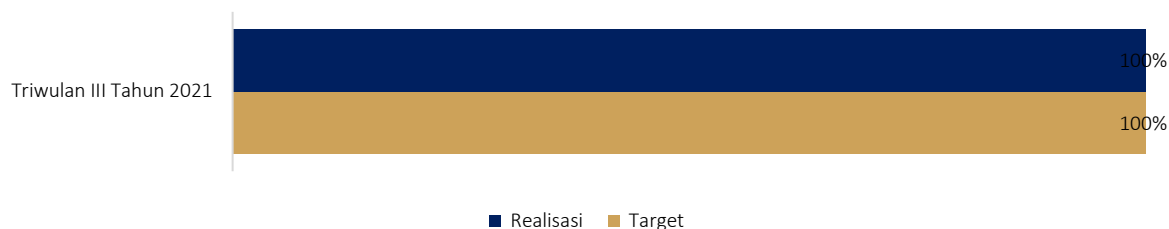
IKK 5.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dapat dihitung berdasarkan realisasi dan target yang dicanangkan. Adapun untuk menghitung persentase indikator kinerja ini dapat menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III

Capaian Persentase Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan III telah mencapai 100%. Adapun maksud dari pencapaian ini adalah dengan melihat layanan perkantoran baik di kantor dan satpel yang berjalan dengan seiring lamanya bulan berjalan dalam 1 tahun anggaran.



Grafik II.13 Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Hingga Triwulan III berakhir, capaian IKK ini telah mencapai 100% berdasarkan penjelasan sebelumnya.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu akan dipertahankan kinerja layanan perkantoran baik di kantor maupun di satpel demi terwujudnya birokrasi yang baik.

C. Realisasi Anggaran

1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Pagu Anggaran

Pada awal tahun 2021, Alokasi anggaran BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp.191.333.112.000,00. Selanjutnya pada bulan April, terjadi revisi anggaran akibat adanya refocusing anggaran demi penanganan covid-19 dan penanganan pasca badai seroja, sehingga alokasi anggaran berubah menjadi Rp.116.383.060.000,00. Kemudian pada bulan Mei 2021, alokasi anggaran kembali mengalami revisi lagi sehingga nilai anggaran menjadi Rp.115.530.060.000,00. Selanjutnya, revisi terakhir adalah Rp.114.791.218.000. Adapun seluruh anggaran BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan sumber dana dari APBN, yang dapat dirincikan berikut ini.

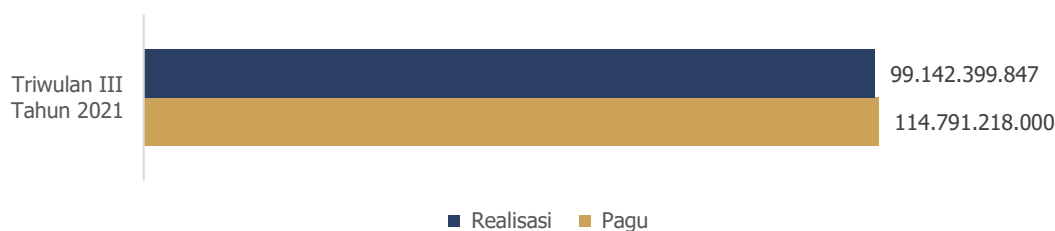
Belanja Modal	65.827.632.000,00	57%
Belanja Barang	44.603.142.000,00	39%
Belanja Pegawai	4.360.444.000,00	4%
Total	114.791.218.000,00	100%

2. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2021 untuk semua jenis belanja sebesar Rp.99.142.399.847,00 atau mencapai 86,37% dari total pagu sebesar 114.791.218.000,00. Adapun rincian realisasi daya serap anggaran hingga triwulan III setelah revisi adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	PAGU Alokasi	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Belanja Modal	Rp65.827.632.000	Rp63.495.786.060	96,46%
2	Belanja Barang	Rp44.603.142.000	Rp32.317.677.504	72,46%
3	Belanja Pegawai	Rp4.360.444.000	Rp3.328.936.283	76,34%
Total		114.791.218.000,00	99.142.399.847,00	86,37%

Tabel II. 6 Realisasi Anggaran Belanja 2021



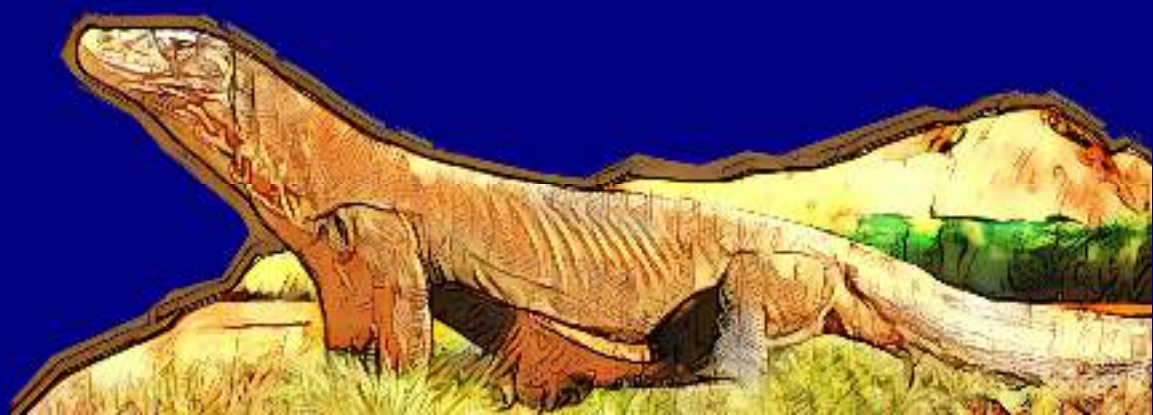
Grafik II. 14 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan III Tahun 2021

Contents

Bab II Capaian Kinerja Triwulan III.....	18
A. Tahapan Pengukuran Kinerja.....	18
1. Pengukuran Capaian Kinerja	19
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
1. Sasaran Kinerja 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	25
2. Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	30
3. Sasaran Kinerja 4: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat.....	31
4. Sasaran Kinerja 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	39
5. Sasaran Kinerja 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	40
C. Realisasi Anggaran	42
1. Alokasi Anggaran Tahun 2021	42
2. Realisasi Anggaran.....	42

BAB III

PENUTUP



Bab III

Penutup

A. Penutup

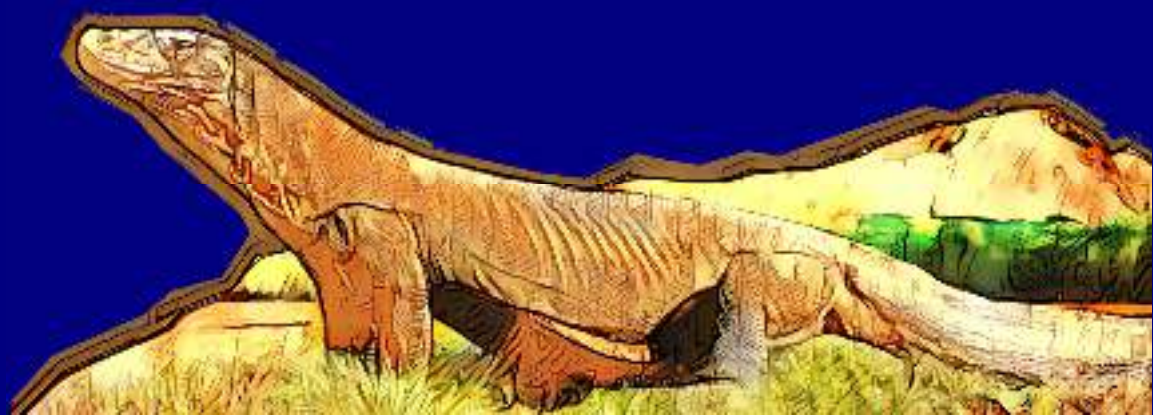
Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawah.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III Tahun 2021, berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja ke-III, dari 19 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 17 (tujuh belas) IKK berstatus hijau ($IKK \leq 100\%$) dan 2 (dua) IKK berstatus merah ($IKK > 100\%$);
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

LAMPIRAN I

LAPORAN RENCANA KINERJA TAHUN 2021





REVISI II RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	0
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	2
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	5
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15,6

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan.	Lokasi	13
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	50
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	44
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kupang, 2 Agustus 2021

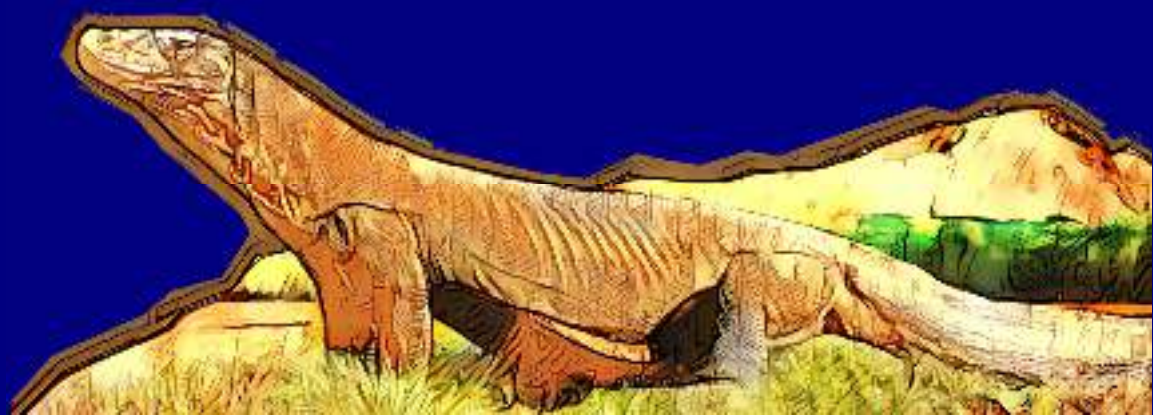
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS
Pembina Tk. 1(IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003

LAMPIRAN II

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021





REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH., M. Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 2 Agustus 2021

Pihak Kedua,

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M. Si

Pihak Pertama,



TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	0
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	2
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	5
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15,6
		IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	13

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	50
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1
		IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	44%
		IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.46.535.543.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.23.770.217.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.31.002.128.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.2.266.397.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.6.018.576.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.5.643.355.000

Kupang, 2 Agustus 2021

Pihak Kedua,



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Pihak Pertama,

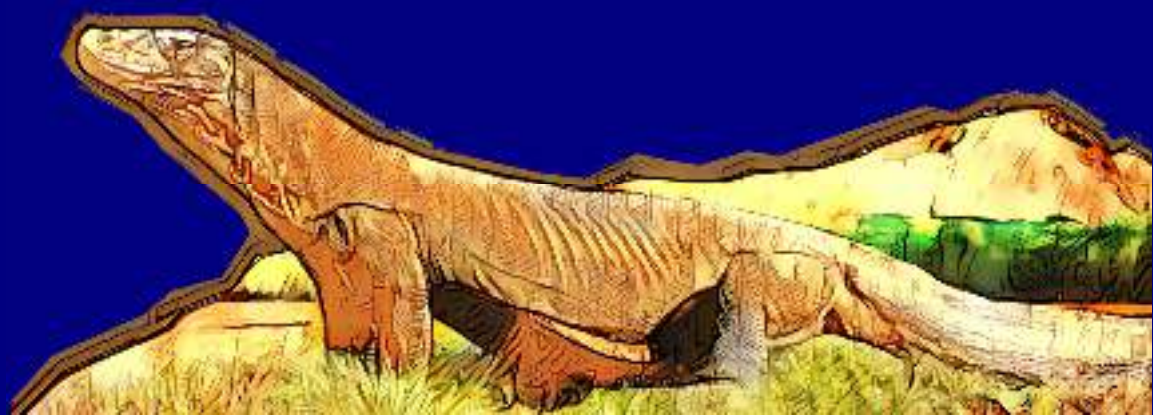


TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003

LAMPIRAN III

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2021





REVISI II RENCANA AKSI ATAS REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

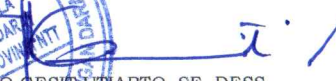
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Penyelenggaraan Angkutan Jalan Bersubsidi pada 35 trayek di Provinsi NTT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 6.144.976.000	Seksi Transportasi Jalan
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Seksi Transportasi Jalan
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Seksi Transportasi Jalan
		IKK1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	2	Pembangunan Terminal pada 2 lokasi Bimoku dan Motaain	-	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	16,7	Rp 20.500.000.000	Seksi Transportasi Jalan
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan monitoring pengawasan keperintisan angkutan penyeberangan di NTT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 19.890.567.000	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	5	Pengoperasian Satpel Pelabuhan Penyeberangan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Rp 3.349.957.000	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Seksi Transportasi Jalan
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Seksi Transportasi Jalan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab	
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96	Penerapan SPM di Pelabuhan SDP yang sedang beroperasi	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	Rp 99.120.000	Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis	
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan keselamatan jalan pada Ruas Jalan Nasional di NTT	1,15		12	13	12,34	12	12,68	12,64	12,19	12			Rp 19.838.897.000	Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15,6	Membandingkan jumlah kendaraan yang melanggar ODOL dengan jumlah total kendaraan yang masuk ke UPPKB	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	Rp 1.848.861.000	Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	13	Pengadaan ZoSS, RASS dan batas kecepatan di ruas jalan nasional di NTT			1	2	2	2	2	2	1	1			Rp 3.834.610.000	Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	50	Mengadakan kegiatan sosialisasi Andalalin di Provinsi NTT											1		Rp 88.912.000	Seksi Transportasi Jalan	
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1	Pengoperasian Fasilitas UPUBKB yang sesuai dengan standar internasional (UN-ECE)						1								Rp 72.072.000	Seksi Transportasi Jalan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	44%	Melaksanakan standarisasi pengujian kendaraan bermotor	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%	44%		Seksi Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	3	Pengadaan dan pemasangan SBNP pada Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Hansisi dan Panama			0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125			Rp 4.205.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100	Melaksanakan penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat:	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	Rp 6.018.576.000	Subbagian Tata Usaha
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85.5	Memastikan kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan realisasi kinerja	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	Rp 5.643.355.000	Subbagian Tata Usaha

Kupang, 2 Agustus 2021

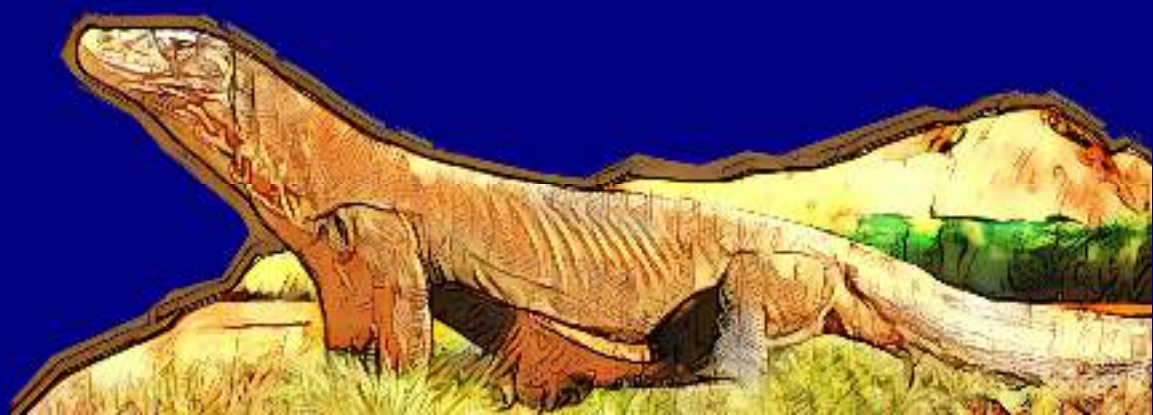
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KAPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


TITO GESIT UTIARTO, SE, DESS
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN

LAMPIRAN IV

*LAPORAN REALISASI KEUANGAN
TAHUN 2021*



LAPORAN REALISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII

Bulan : **Agustus**

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	105.107.873.000	87.883.228.872	17.224.644.128
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	46.069.131.000	37.975.152.959	8.093.978.041
4637.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	4.500.000.000	4.500.000.000	0
4637.CBP.001	Terminal Penumpang Tipe-A (PEN)	4.500.000.000	4.500.000.000	0
052	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-A Lanjutan	4.500.000.000	4.500.000.000	0
A	<u>Pembangunan Terminal Tipe A</u>	4.500.000.000	4.500.000.000	0
533111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.500.000.000	4.500.000.000	0
4637.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	25.569.131.000	17.475.154.959	8.093.976.041
4637.QAH.001	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	5.678.564.000	3.956.818.565	1.721.745.435
051	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	5.678.564.000	3.956.818.565	1.721.745.435
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	5.678.564.000	3.956.818.565	1.721.745.435
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	5.678.564.000	3.956.818.565	1.721.745.435
4637.QAH.008	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	19.890.567.000	13.518.336.394	6.372.230.606
051	Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	19.890.567.000	13.518.336.394	6.372.230.606
A	<u>Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis</u>	19.890.567.000	13.518.336.394	6.372.230.606
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	19.890.567.000	13.518.336.394	6.372.230.606
4637.RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	16.000.000.000	15.999.998.000	2.000
4637.RBP.018	Terminal Barang Internasional (Prioritas Nasional) (PEN)	16.000.000.000	15.999.998.000	2.000
051	Pembangunan Terminal Barang Internasional (Prioritas Nasional)	16.000.000.000	15.999.998.000	2.000
A	<u>Pembangunan Terminal Barang Internasional</u>	16.000.000.000	15.999.998.000	2.000
533111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.000.000.000	15.999.998.000	2.000
4638	Pelayanan Transportasi Darat	23.770.217.000	20.293.358.315	3.476.858.685
4638.CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	15.000.000.000	13.034.444.760	1.965.555.240
4638.CBP.032	Pelabuhan Penyeberangan ditingkatkan (PEN)	15.000.000.000	13.034.444.760	1.965.555.240
051	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan	15.000.000.000	13.034.444.760	1.965.555.240
A	<u>Pelabuhan Penyeberangan Ditingkatkan</u>	15.000.000.000	13.034.444.760	1.965.555.240
533111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.000.000.000	13.034.444.760	1.965.555.240
4638.CDP	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	3.770.217.000	2.289.889.555	1.480.327.445
4638.CDP.038	Terminal Penumpang Tipe-A dikelola (PEN)	10.500.000	0	10.500.000
051	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	10.500.000	0	10.500.000
A	<u>Operasional Terminal Tipe A</u>	10.500.000	0	10.500.000
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.500.000	0	10.500.000
4638.CDP.040	Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	338.760.000	188.725.847	150.034.153
051	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	338.760.000	188.725.847	150.034.153
A	<u>Operasional Terminal Tipe A</u>	338.760.000	188.725.847	150.034.153
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	10.000.000	910.000	9.090.000
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20.064.000	16.759.000	3.305.000
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	12.000.000	0	12.000.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	219.700.000	135.200.000	84.500.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	5.350.000	6.650.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.000.000	1.139.500	10.860.500
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20.100.000	3.847.347	16.252.653
522141	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Sewa	25.000.000	25.000.000	0
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.896.000	520.000	6.376.000
523199	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.000.000	0	1.000.000
4638.CDP.045	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	3.349.957.000	2.101.163.708	1.248.793.292
051	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	3.349.957.000	2.101.163.708	1.248.793.292
A	<u>Operasional Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi</u>	1.561.763.000	922.015.578	639.747.422
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	26.720.000	10.688.000	16.032.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	943.799.000	559.366.000	384.433.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	104.020.000	72.695.000	31.325.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.000.000	7.200.000	10.800.000
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	101.400.000	71.446.365	29.953.635
522141	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Sewa	145.560.000	145.560.000	0
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	0	10.000.000
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	187.014.000	29.970.000	157.044.000
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.250.000	25.090.213	159.787
B	<u>Operasional Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok</u>	943.826.000	600.147.005	343.678.995
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	10.008.000	3.148.617	6.859.383
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	85.424.000	53.679.000	31.745.000
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	5.000.000	1.500.263	3.499.737
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	7.500.000	532.000	6.968.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	685.464.000	421.824.000	263.640.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22.500.000	13.500.000	9.000.000
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	19.930.000	9.113.125	10.816.875
522141	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Sewa	75.000.000	75.000.000	0

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.000.000	20.990.000	10.000
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	860.000	11.140.000
C	<u>Operasional Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo</u>	541.320.000	354.280.271	187.039.729
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	15.000.000	7.828.250	7.171.750
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	32.604.000	26.927.000	5.677.000
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	3.000.000	1.775.171	1.224.829
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	6.000.000	3.000.000	3.000.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	347.126.000	213.616.000	133.510.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15.500.000	8.804.000	6.696.000
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	28.590.000	6.025.250	22.564.750
522141	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Sewa	75.000.000	75.000.000	0
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000	1.500.000	6.500.000
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.500.000	9.804.600	695.400
D	<u>Operasional Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang</u>	138.070.000	99.865.343	38.204.657
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	12.500.000	4.339.500	8.160.500
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12.540.000	12.473.000	67.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	3.000.000	2.090.000	910.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.500.000	2.500.000	3.000.000
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	17.530.000	0	17.530.000
522141	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Sewa	42.000.000	42.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	6.462.843	8.537.157
532111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000	30.000.000	0
E	<u>Operasional Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Naikliu</u>	164.978.000	124.855.511	40.122.489
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	14.000.000	5.700.000	8.300.000
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	15.048.000	14.941.000	107.000
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	7.000.000	3.375.911	3.624.089
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	9.000.000	3.600.000	5.400.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10.000.000	4.650.000	5.350.000
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25.930.000	18.106.600	7.823.400
522141	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Sewa	42.000.000	42.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000	2.482.000	9.518.000
532111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000	30.000.000	0
4638.CDP.047	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola (PEN)	71.000.000	0	71.000.000
051	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	71.000.000	0	71.000.000
A	<u>Operasional Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi</u>	35.000.000	0	35.000.000
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000	0	35.000.000
C	<u>Operasional Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo</u>	36.000.000	0	36.000.000
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.000.000	0	36.000.000
4638.RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	5.000.000.000	4.969.024.000	30.976.000
4638.RAC.029	Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional) (PEN)	5.000.000.000	4.969.024.000	30.976.000
051	Pembangunan ATCS/ITS Prioritas Nasional	5.000.000.000	4.969.024.000	30.976.000
A	<u>PEMBANGUNAN ATCS/ITS</u>	5.000.000.000	4.969.024.000	30.976.000
532111	[00000000-D-0-0-039-24-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000.000	4.969.024.000	30.976.000
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	33.002.128.000	28.545.240.573	4.456.887.427
4639.CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	8.111.682.000	7.180.891.000	930.791.000
4639.CAC.053	Zona Selamat Sekolah (ZoSS) (PEN)	3.834.610.000	3.762.891.000	71.719.000
051	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	3.834.610.000	3.762.891.000	71.719.000
A	<u>Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)</u>	3.834.610.000	3.762.891.000	71.719.000
532111	[00000000-D-0-0-039-24-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.834.610.000	3.762.891.000	71.719.000
4639.CAC.059	Alat Uji dan Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor	72.072.000	72.000.000	72.000
051	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	72.072.000	72.000.000	72.000
A	<u>Pengadaan Alat Kalibrasi</u>	72.072.000	72.000.000	72.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	72.072.000	72.000.000	72.000
4639.CAC.067	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar (PEN)	4.205.000.000	3.346.000.000	859.000.000
051	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar	4.205.000.000	3.346.000.000	859.000.000
A	<u>Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar</u>	4.205.000.000	3.346.000.000	859.000.000
532111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.205.000.000	3.346.000.000	859.000.000
4639.CCC	OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	3.197.461.000	3.197.461.000	0
4639.CCC.066	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (PEN)	3.197.461.000	3.197.461.000	0
051	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.197.461.000	3.197.461.000	0
A	<u>Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</u>	3.197.461.000	3.197.461.000	0
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.197.461.000	3.197.461.000	0
4639.CDP	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	1.854.088.000	1.164.579.973	689.508.027
4639.CDP.077	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	1.848.861.000	1.164.579.973	684.281.027
052	Operasional UPPKB	1.848.861.000	1.164.579.973	684.281.027
A	<u>Operasional UPPKB Nun Baun Sabu (Beroperasi)</u>	1.435.844.000	904.317.223	531.526.777
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	5.000.000	2.500.000	2.500.000
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	102.828.000	83.787.000	19.041.000
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	5.000.000	2.500.000	2.500.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	31.500.000	4.200.000	27.300.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	1.087.515.000	669.240.000	418.275.000

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	28.700.000	25.100.000	3.600.000
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	42.250.000	42.208.223	41.777
522141	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Sewa	71.160.000	71.160.000	0
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.891.000	3.622.000	42.269.000
532111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000	0	16.000.000
B	Operasional UPPKB Nggorang (Tidak Beroperasi)	119.350.000	71.600.000	47.750.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	2.000.000	2.000.000	0
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	109.850.000	67.600.000	42.250.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	0	1.500.000
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.000.000	2.000.000	4.000.000
C	Operasional UPPKB Watualo (Beroperasi)	230.242.000	149.006.000	81.236.000
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	4.000.000	0	4.000.000
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.032.000	4.725.000	5.307.000
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	4.000.000	0	4.000.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	6.200.000	2.000.000	4.200.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	109.850.000	67.600.000	42.250.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.600.000	202.500	3.397.500
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12.400.000	2.318.500	10.081.500
522141	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Sewa	71.160.000	71.160.000	0
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000	1.000.000	0
532111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000	0	8.000.000
D	Operasional UPPKB Oesapa (Tidak Beroperasi)	63.425.000	39.656.750	23.768.250
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	1.000.000	0	1.000.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	54.925.000	33.800.000	21.125.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	0	1.500.000
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.000.000	5.856.750	143.250
4639.CDP.078	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola (PEN)	5.227.000	0	5.227.000
051	Operasional UPPKB	5.227.000	0	5.227.000
C	Operasional UPPKB Watualo (Beroperasi)	5.227.000	0	5.227.000
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.227.000	0	5.227.000
4639.RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	19.838.897.000	17.002.308.600	2.836.588.400
4639.RAC.002	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) (PEN)	19.838.897.000	17.002.308.600	2.836.588.400
051	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	19.838.897.000	17.002.308.600	2.836.588.400
A	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	17.838.897.000	17.002.308.600	836.588.400
532111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.838.897.000	17.002.308.600	836.588.400
B	Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan	2.000.000.000	0	2.000.000.000
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.939.200.000	0	1.939.200.000
532111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.800.000	0	60.800.000
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	2.266.397.000	1.069.477.025	1.196.919.975
4640.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2.266.397.000	1.069.477.025	1.196.919.975
4640.EAL.909	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	2.266.397.000	1.069.477.025	1.196.919.975
051	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	2.266.397.000	1.069.477.025	1.196.919.975
A	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD	120.000.000	119.150.293	849.707
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.000.000	119.150.293	849.707
B	Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara	212.000.000	0	212.000.000
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	12.000.000	0	12.000.000
524112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Tetap	200.000.000	0	200.000.000
C	Penyusunan Bahan, Rencana Kerja dan Anggaran	90.000.000	78.727.358	11.272.642
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	8.000.000	4.000.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.000.000	18.000.000	0
524112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Tetap	60.000.000	52.727.358	7.272.642
D	Penyusunan LAKIP, LAPTAH, Penetapan Kinerja	100.000.000	33.960.373	66.039.627
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15.000.000	7.500.000	7.500.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.000.000	5.000.000	5.000.000
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000	21.460.373	38.539.627
524114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	15.000.000	0	15.000.000
E	Rapat Teknis/ Koordinasi / Konsolidasi	170.000.000	140.617.695	29.382.305
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20.000.000	20.000.000	0
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000	34.927.472	25.072.528
524114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	30.000.000	26.055.000	3.945.000
524119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	60.000.000	59.635.223	364.777
F	Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran,	333.900.000	147.662.049	186.237.951
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	161.900.000	81.600.000	80.300.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	89.500.000	21.000.000	68.500.000
524112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Tetap	60.000.000	44.722.049	15.277.951
524114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	22.500.000	340.000	22.160.000
G	Monitoring Pengawasan Pembangunan Bidang Perhubungan Darat	104.852.000	89.490.940	15.361.060
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	6.000.000	6.000.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.000.000	9.000.000	9.000.000
524112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Tetap	74.852.000	74.490.940	361.060
H	Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	129.120.000	71.258.549	57.861.451

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	0	12.000.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.000.000	0	18.000.000
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.120.000	71.258.549	27.861.451
I	<u>Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</u>	150.468.000	121.604.531	28.863.469
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	12.000.000	0	12.000.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16.500.000	0	16.500.000
524112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Tetap	121.968.000	121.604.531	363.469
J	<u>Monitoring dan Pengawasan Transportasi ASDP</u>	105.557.000	74.053.561	31.503.439
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	105.557.000	74.053.561	31.503.439
K	<u>Kotingensi Bencana dan Tanggap Darurat</u>	70.020.000	24.651.485	45.368.515
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	60.000.000	14.631.485	45.368.515
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.020.000	10.020.000	0
L	<u>Monitoring DAK</u>	110.610.000	54.019.524	56.590.476
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	12.000.000	0	12.000.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16.500.000	0	16.500.000
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.110.000	54.019.524	28.090.476
M	<u>Sosialisasi ANDALALIN di Prov NTT</u>	88.912.000	5.277.286	83.634.714
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	8.140.000	0	8.140.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.226.000	0	2.226.000
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Jasa Profesi	34.436.000	0	34.436.000
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.110.000	5.277.286	38.832.714
N	<u>Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan</u>	150.212.000	22.125.300	128.086.700
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16.500.000	0	16.500.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.000.000	0	12.000.000
524112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Tetap	121.712.000	22.125.300	99.586.700
O	<u>Monitoring Pengawasan Kalibrasi dan Akreditasi Alat Uji</u>	168.980.000	66.431.480	102.548.520
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	16.500.000	0	16.500.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	0	12.000.000
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140.480.000	66.431.480	74.048.520
P	<u>Ramp Check Angkutan Perintis</u>	80.910.000	14.303.401	66.606.599
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	12.000.000	0	12.000.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16.500.000	0	16.500.000
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.410.000	14.303.401	38.106.599
Q	<u>Monitoring dan Pengawasan UPPKB</u>	44.586.000	6.143.200	38.442.800
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	12.000.000	0	12.000.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	16.500.000	0	16.500.000
524112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Tetap	16.086.000	6.143.200	9.942.800
R	<u>Bimbingan Teknis Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan</u>	36.270.000	0	36.270.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	9.810.000	0	9.810.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	26.460.000	0	26.460.000
WA	Program Dukungan Manajemen	10.379.020.000	7.193.128.002	3.185.891.998
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.018.576.000	4.257.628.617	1.760.947.383
4670.EAA	Layanan Perkantoran	6.018.576.000	4.257.628.617	1.760.947.383
4670.EAA.904	Layanan Perkantoran	5.975.028.000	4.214.658.617	1.760.369.383
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.975.028.000	4.214.658.617	1.760.369.383
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	4.964.124.000	3.596.934.617	1.367.189.383
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	1.331.603.000	809.792.500	521.810.500
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	453.623.000	236.561.000	217.062.000
521114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.000.000	15.492.500	2.507.500
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	327.625.000	257.235.265	70.389.735
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	26.000.000	6.089.250	19.910.750
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	37.100.000	18.849.245	18.250.755
521241	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	373.000.000	187.036.000	185.964.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	74.303.000	44.842.311	29.460.689
522119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	252.000.000	107.915.432	144.084.568
522141	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Sewa	961.200.000	952.200.000	9.000.000
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Jasa Profesi	15.000.000	0	15.000.000
522191	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Jasa Lainnya	12.000.000	0	12.000.000
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.500.000	12.490.000	10.000
523112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	10.000.000	0	10.000.000
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.000.000	10.025.000	6.975.000
523123	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	58.000.000	51.969.986	6.030.014
524111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	795.412.000	759.086.186	36.325.814
524112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Tetap	60.000.000	55.660.252	4.339.748
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.758.000	33.200.000	36.558.000
524114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	20.000.000	3.060.000	16.940.000
524119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	40.000.000	35.429.690	4.570.310
B	<u>Honorarium Satuan Kerja</u>	422.880.000	246.680.000	176.200.000
521115	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	410.640.000	239.540.000	171.100.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	12.240.000	7.140.000	5.100.000
C	<u>Honor ULP / Pejabat Pengadaan / PPHP</u>	168.720.000	156.280.000	12.440.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	168.720.000	156.280.000	12.440.000
D	Kegiatan Satuan Pelayanan BPTD NTT	419.304.000	214.764.000	204.540.000
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	239.304.000	147.264.000	92.040.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	180.000.000	67.500.000	112.500.000
4670.EAA.905	Layanan Perkantoran (PEN)	43.548.000	42.970.000	578.000
051	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	43.548.000	42.970.000	578.000
A	TANPA SUB KOMPONEN	43.548.000	42.970.000	578.000
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.548.000	42.970.000	578.000
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	4.360.444.000	2.935.499.385	1.424.944.615
4671.EAA	Layanan Perkantoran	4.360.444.000	2.935.499.385	1.424.944.615
4671.EAA.915	Gaji	4.360.444.000	2.935.499.385	1.424.944.615
001	Gaji dan Tunjangan	4.360.444.000	2.935.499.385	1.424.944.615
A	TANPA SUB KOMPONEN	4.360.444.000	2.935.499.385	1.424.944.615
511111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Gaji Pokok PNS	1.659.288.000	1.169.970.500	489.317.500
511119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.000	19.173	5.827
511121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	109.968.000	85.916.734	24.051.266
511122	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Anak PNS	33.657.000	26.240.270	7.416.730
511123	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	44.460.000	38.160.000	6.300.000
511125	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. PPh PNS	1.540.000	1.318.420	221.580
511126	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Beras PNS	94.871.000	74.013.240	20.857.760
511129	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Makan PNS	227.805.000	135.159.000	92.646.000
511151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	74.950.000	58.420.000	16.530.000
512211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Lembur	174.021.000	35.218.000	138.803.000
512411	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pegawai (Tunjangan	1.939.859.000	1.311.064.048	628.794.952



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



bptdprovntt



Bptd Ntt